

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah mengupayakan penulis dalam membuat suatu penelitian yang mana mencari perbandingan sumber informasi untuk temukan ide yang baru untuk melakukan penelitian selanjutnya oleh penulis. dalam melakukan penelitian dahuluh yang pernah menelitinya, merupakan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, dan dalam hal ini di lakukan untuk memperkaya dalam teori yang mengkaji terhadap penelitian yang di teliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber pengembangan topik penelitian, antara lain sebgai berikut.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Alifurrohman	Melihat Akhir Hubungan Diplomatik Arab Saudi Dengan Qatar. Pada 2017	Peneliti Muhammad Alifurrohman ini menjelsakan bahwa perkembangan awal sejarah Arab Saudi dengan Qatar dan juga menjelaskan mengenai terjadinya keretakan hubungan kedua negara Arab Saudi dan Qatar. Dan mengetahui awal perjalanan hubungan antara Arab Saudi terhadap Qatar sehingga menjadi acuan dalam penjelasan

			<p>penelitiannya. Dalam tulisan ini juga menjelsakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar dan faktor-faktor yang ada pada kesepakatan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar yang Blokade ekonomi dan transportasi dilakukan terhadap Qatar. Kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar.¹</p>
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Alijza Hariz Rachmad	Determinan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Dengan Qatar Pada 2017 Yang Berakhir	<p>Penelitian Alijza Hariz Rachmad ini menjelaskan bahwa Arah kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait pemutusan hubungan diplomatik menjadi bentuk krisis di Timur Tengah pasca peristiwa Arab Spring. memberikan bantuan kepada organisasi yang di kawasan Timur Tengah dicap sebagai bentuk “terorisme” yang mampu mengancam keamanan di kawasan.</p> <p>sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar merupakan dua negara yang sangat aktif dalam GCC. Sebagai anggota GCC, Arab Saudi, dan Qatar memiliki posisi</p>

¹[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56863/1/MUHAMMAD%20ALIFUR ROHMAN.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56863/1/MUHAMMAD%20ALIFUR%20ROHMAN.FISIP.pdf)

			signifikan terhadap Uni Eropa atau Uni Eropa, khususnya terkait perdagangan dan penyesuaian kebijakan keamanan. Dan profil kedua negara Arab Saudi dan Qatar. ²
--	--	--	--

3	Umu Quro'atul Alvin Masfiya	Pemutusan Hubungan Diplomatik Qatar Oleh Arab Saudi Pada Tahun 2017 Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Internasional	<p>Penelitian ini membahas mengenai pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 yang di latar belakang oleh pertumbuhan ekonomi Qatar serta orientasi ekonomi Politik Qatar di kawasan Timur Tengah.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Unit analisa dari penelitian ini adalah State (Qatar dan Arab Saudi) Hasil dari penelitian ini adalah kekuatan ekonomi politik Qatar yang dicapai dari pengembangan LNG bersama dengan Iran dan Israel menjadikan Qatar sebagai negara</p>
---	-----------------------------	--	---

² <http://repository.ub.ac.id/164490/1/Alijza%20Hariz%20Rachmad.pdf>

			yang berpengaruh di politik Timur Tengah. ³
--	--	--	--

2.2. Kerangka Teori

Dalam sebuah karya ilmiah seorang peneliti atau penulis membutuhkan sebuah teori untuk menjadikan landasan bagi seorang menelitinya. Bagi dalam ilmu hubungan internasional. Teori untuk di gunakan menganalisis problematika di dunia universal. Banyak sekali teori disiplin dalam hubungan internasional dengan mendefinisikan berbagai ragam teori. Salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional Maka peneliti mengambil teori untuk mendasarkan dalam sebuah penulisan ini adalah Teori Pengambilan Keputusan (*Decision making*)., agar dapat menjadi akar kerangka dalam penelitian adanya berbasis membahas isu-isu atau pembahasan di dalam penulisan ini. Menjadikan teori ini yang relevan dalam penulisan ini.

2.1.1. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*).

Dalam menyusun ilmiah logis, seorang penulis atau analis tentu membutuhkan suatu teori untuk digunakan sebagai premis untuk pertanyaannya. Bagi peneliti hubungan di seluruh dunia, hipotesis digunakan untuk menganalisis isu-isu yang terjadi di dunia universal. Banyaknya spekulasi dalam ajaran hubungan dunia membuat definisi spekulasi ini terlalu bergeser. Salah satu definisi teori yang sependapat dengan para peneliti hubungan universal adalah Teori adalah persepsi untuk menguji spekulasi

³http://digilib.uinsby.ac.id/27896/7/Umu%20Quro%27atul%20Alvin%20Masfiya_I92214017.pdf

tentang dunia.⁴ Hipotesis bahwa pencipta bekerja sebagai premis untuk penelitian ini adalah sudut pandang Pengambilan Keputusan (*Decision Making*).

Perkembangan teori pengambilan keputusan (*Decision Making*) mulai dikembangkan pada tahun 1950-an di Negara-Negara Bersama, dipelopori oleh Herbert A. Simon dalam bukunya *Perilaku Resmi: Herbert A Pikirkan tentang Bentuk Pengambilan Keputusan di Organisasi Pengatur*. Pengambilan keputusan ini juga diterima oleh banyak orang sebagai proses perbandingan dan penentuan pilihan-pilihan yang telah dibuat bersama-sama mengacu pada latihan di mana individu berusaha untuk membentuk tujuan dari perilaku yang ada. Pengambilan keputusan ini juga akhirnya memutuskan pengembangan yang tidak didekati.

Hubungan karakter di layar yang baik dengan suatu bangsa adalah ketika suatu bangsa perlu membentuk pilihan pendekatan luar dengan mempertimbangkan sekitar tempat menarik dan hambatan yang ditemukan. Pembuatan pendekatan tentunya dengan pegangan pemeriksaan yang tepat. Dalam menentukan pilihan, Anda harus memprioritaskan dan memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan.

Karakter suara di layar menekankan bahwa pengambilan keputusan untuk mempersiapkan pilihan melibatkan langkah-langkah memutuskan

⁴ Linklater dan Burchill (2009). *Teori Hubungan Internasional (Terjemahan)*. : Nusa Media, Bandung.

tujuan, opsi atau pilihan, kemunculan, dan pilihan kemungkinan. Ini berbunyi seolah-olah mengatakan bahwa keputusan dapat dibuat dengan objektivitas, menggunakan analisis biaya-manfaat dan pemikiran berkepala dingin, yang mengarah pada keputusan yang dibuat, tepat, dan tepat. hawaii. Ungkapannya yang menekankan pada porsi kewenangan, khususnya Presiden atau Kepala Pemerintahan suatu negara, menunjukkan hal tersebut. Ini sering terjadi karena pertunjukan karakter di layar yang cerdas sering digunakan pada saat krisis, memerlukan keputusan awal dengan mempertimbangkan opsi yang tersedia.⁵ Keputusan yang diambil tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang paling kecil risikonya dan paling menguntungkan negaranya.

Teori pengambilan keputusan (*Decision Making*) ini merupakan salah satu spekulasi dalam hubungan dunia yang berfungsi untuk menganalisis hubungan universal tokoh-tokoh di layar dalam membuat sebuah aransemen. Definisi hipotesis ini menyetujui Coplin dapat menjadi cara untuk menemukan perilaku negara dalam hubungan universal. Coplin menambahkan, dalam melakukan suatu pendekatan, seorang karakter di layar harus memperhatikan dua komponen mendasar, yaitu variabel dalam dan komponen luar. Pada variabel internal, tandan perumahan akan mempertimbangkan pemerintah untuk mengeluarkan pengaturan yang menguntungkan mereka, kemudian pembuat undang-undang akan melihat ini

⁵jurnal,feaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj"URL:https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2884/4/Bab%20I.pdf

sebagai peluang untuk mencari kontrol dengan membangun koalisi dengan tandan tersebut.

Sedangkan pada variabel luar, pemerintah akan berusaha memaksimalkan kapasitasnya dalam mengatur pertemuan antar rumah tangga, dengan meminimalkan hasil yang tidak nyaman bagi pihak luar. Kedua hal ini akan terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh tokoh-tokoh layar kaca negara dan seniman pertunjukan hubungan universal, tidak satu pun dari mereka dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan selama bangsa masih ada.

Graham Allison, seorang profesor politik di Harvard, telah melakukan perspektif yang membangun model teoretis baru untuk memahami proses pengambilan keputusan. (*Decision Making*) Dalam kedua kasus, Allison tidak sepenuhnya berhasil, tetapi ada beberapa hasil yang menarik. Allison menggunakan tiga model, atau seperangkat asumsi, untuk menganalisis krisis. Model I adalah "Aktor Rasional", cara pandang tradisional terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Ini mengasumsikan bahwa satu orang di puncak pada akhirnya membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional dari keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari tindakan yang diusulkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Model I telah melayani berbagai tujuan, ternyata perlu dilengkapi dengan kerangka acuan yang memisahkan pemerintah dan menekankan pada organisasi dan aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan

Dinamika intranasional yang mengarah pada tindakan pemerintah harus ditangani dalam pemahaman Model I tentang tujuan nasional dan tekanan yang ditimbulkan oleh isu-isu dalam hubungan internasional. RAM menghubungkan tujuan dan tindakan dalam bentuk yang paling dasar. Mengetahui tujuan aktor memberi Anda petunjuk penting tentang apa yang mungkin dia lakukan. memiliki teori yang kuat tentang mengapa aktor melakukan apa yang dia lakukan berdasarkan pengamatan perilaku dan mempertimbangkan apa tujuan aktor mungkin ketika saya menemukan tujuan yang berhasil diciptakan oleh tindakan.⁶

Model II, "Proses Organisasi," mengasumsikan bahwa "perilaku pemerintah karena itu dapat dipahami. kurang sebagai pilihan yang disengaja dan lebih sebagai output dari organisasi besar yang berfungsi sesuai dengan pola standar perilaku," yang merupakan jargon untuk mengatakan birokrasi menjalankan segalanya, terlepas dari apa yang diinginkan Presiden atau Perdana Menteri. Model III, "Politik Pemerintah", kontras dengan Model I dengan melibatkan lebih banyak aktor dalam permainan; yaitu, Model III menekankan tarik-menarik politik pribadi di puncak organisasi, apakah itu Dewan Keamanan Nasional (NSC) atau Presidium. Allison menjelaskan dengan sangat rinci apa yang dia maksud dan bagaimana modelnya bekerja;

⁶ G. ALLISON (1971. Tahun 1999). Krisis Rudal Kuba seperti yang Dijelaskan dalam Esensi Keputusan (edisi kedua). (Diedit oleh E. C. Martin Lodge) The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, Juli 2016, halaman 273-274, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.38

memang, dia tampaknya lebih tertarik untuk membangun proposisi teoretisnya daripada berurusan dengan peristiwa aktual.

Allison berpendapat bahwa menggunakan asumsi Model II atau Model III tentang sifat pengambilan keputusan (*Making Decision*) menghasilkan wawasan baru dalam memeriksa tindakan pemerintah, wawasan yang mungkin membawa kita lebih dekat ke kenyataan. Tetapi untuk menekankan modelnya, ia menciptakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan alasan bahwa semua penyelidik sebelumnya di bidang ini telah mengabaikan dampak birokrasi dan pentingnya politik swasta tingkat tinggi. Tidak ada yang benar. Selanjutnya, model Allison sama sekali tidak baru seperti yang dia klaim. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa sejarawan harus mempertimbangkan sebanyak mungkin dalam menjelaskan keputusan tersebut, yang merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh para torannya sejak lama.⁷

Dalam pemikiran ini, pencipta akan mencoba untuk menganalisis pendekatan Arab Saudi terhadap barikade Qatar melalui dua variabel ini, menjadi variabel dalam dan luar yang spesifik. Variabel internal mempertimbangkan bagaimana keadaan rumah tangga di Arab Saudi membuatnya harus menjadi isu pendekatan ini. Dalam hitungan ini,

⁷ by P.Z. Graham T. Allison (1999). *The Cuban Missile Crisis: The Essence of Decision* (2, illustrated ed., Vols (Little, Brown and company 338 pp.;) (Michigan University: 27 September 2008) Harvard

keadaan rumah tangga Arab Saudi, yang dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi, menjadi yang paling diperhitungkan yang menghasut negara untuk memaksakan pendekatan blokade terhadap Qatar.

Untuk sementara, faktor eksternal mempertimbangkan bagaimana hal-hal berada dalam lingkaran universal, lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah yang mendorong pemerintah Saudi Timur Tengah untuk mengeluarkan pengaturan ini. Dalam karakter universal di layar kaca di wilayah Timur Tengah menjadi penyebab paling banyak yang mendorong Arab Saudi untuk mengeluarkan aturan baru, salah satunya ilustrasi singkatnya adalah hubungan Qatar dan Iran yang di luar dugaan merupakan musuh bebuyutan Timur Tengah.

Arab Saudi, menandai dan memperlakukan Timur Tengah Saudi harus melakukan blokade terhadap Qatar yang disebabkan oleh kedekatannya dengan Iran. Menurut Coplin terdapat empat unsur yang dapat menentukan kebijakan luar negeri. Pertama adalah politik dalam suatu negara, kedua adalah pembuat keputusan itu sendiri, ketiga adalah sektor ekonomi dan militer dan keempat adalah keadaan internasionalnya.⁸

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi orang Timur Tengah Saudi dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya berupa blokade terhadap Qatar,

⁸ W. D. Coplin (2003). Edisi Kedua Pengantar Politik Internasional: Sebuah Studi Teoritis. Sinar Baru Algesindo di Bandung. Hlm.11.

dimana dari keempat hal tersebut, penulis hanya akan menggunakan dua unsur saja, yaitu politik dalam negeri Arab Saudi atau faktor dalam (domestik) serta keadaan internasional di kawasan Timur Tengah atau faktor eksternal. Menurut penulis, teori ini adalah teori yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh aktor internasional, dimana teori ini mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya penyusunan melalui dua variabel, yaitu variabel dalam dan variabel luar.

2. 3. Kerangka Konsep

Meneliti ingin menegaskan dalam pembahasan penelitian ini dengan konsep yang ada kepentingan suatu negara, Dengan demikian, dapat ditangkap bahwa rasa nasionalisme digunakan sebagai landasan oleh suatu bangsa untuk menempatkan tatanan luarnya melalui suatu tatanan yang dibuat oleh para pengambil keputusan dipolomasi terhadap negaranya dalam rangka menjaga keamanan, daya dukung, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup. dari individu bangsa mereka. Apalagi selama ini tidak ada penegasan tentang apa yang menjadi daya tarik nasional yang meniadakan perspektif pengaturan dan penjelas dalam memperjelas konsep tersebut. Dari semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perwujudan

rasa nasionalisme yang digambarkan di atas diliputi oleh hasil kain, khususnya kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa.⁹

2.1.1.Konsep Diplomasi

Konsep Diplomasi ini merupakan salah satu dari sarana terpenting untuk menegaskan kepentingan nasional suatu negara bangsa yang ada. Maka Diplomasi sebagai alat terpenting untuk mengklaim kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain dan organisasi internasional. Melalui diplomasi ini, negara dapat membangun citranya sendiri. Dalam hubungan antar negara, diplomasi umumnya berlangsung dari awal ketika satu negara ingin menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, hingga kedua negara membangun lebih banyak hubungan. Diplomasi adalah praktik negosiasi antar negara melalui perwakilan resmi.

Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri, tanpa campur tangan dari partai politik atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat merangkul seluruh proses diplomasi, baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan politik luar negeri. Diplomasi dikatakan mencakup teknologi operasional untuk mempromosikan kepentingan nasional melintasi batas-batas yurisdiksi. Karena meningkatnya saling ketergantungan antar negara, semakin banyak konferensi dan konferensi internasional diadakan hingga hari ini.

⁹Unikom Nicolaus Chrisye Irlando Masela. Dua puluh persen dari [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1258/8/Unikom Nicolaus Dua puluh persen Chrisye Ireland 20 persen Dokumen Masela%20 Bab%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1258/8/Unikom%20Nicholaus%20Dua%20persen%20Chrisye%20Ireland%2020%20persen%20Dokumen%20Masela%20Bab%20II.pdf)

Konsep diplomasi ini juga di nobatkan sebagai hubungan atau relasi, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu, diplomasi juga disebut sebagai proses interaksi dua arah bilateral yang berlangsung untuk mencapai kebijakan luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan kebijakan luar negeri seringkali diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan bahwa diplomasi adalah isi utama dari mekanisme pelaksanaan politik luar negeri negara, dan diplomasi adalah proses pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi dan kebijakan luar negeri saling terkait dan mendukung.¹⁰ Diplomasi terus berkembang seiring dengan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Kegiatan diplomatik adalah proses yang sering dilakukan dengan menggunakan metode negosiasi, selain bentuk kegiatan diplomatik lainnya seperti pertemuan, kunjungan, dan kesepakatan. Oleh karena itu, negosiasi merupakan salah satu cara diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional.

Dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice*, Sir Ernest Satow menawarkan deskripsi teknik diplomatik yang efektif. Penerapan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menangani hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, menurut Sir Ernest Satow, itulah yang dimaksud dengan diplomasi.¹¹

¹⁰ S.L. Roy, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 1995 hlm.1

¹¹ S.L Roy, op. cit, hlm. 2.

Diplomasi adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebagai solusi atau jalan keluar untuk mencari penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berkaitan dengan kegiatan damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaan melalui persuasi terus menerus di tengah perubahan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni negosiasi atau suatu cara penyampaian pesan melalui negosiasi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara di bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya.¹², pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lainnya dalam kerangka Hubungan Internasional.

Di setiap negara untuk mendapat mencapai tujuan dan sasaran diplomatiknya dengan berbagai cara. Menurut Kautilya, yaitu dalam bukunya *Kautilya's concept of diplomacy: a new interpretation that the main purpose of diplomacy is to protect the interest of the country it*. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari diplomacy adalah untuk menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara itu sendiri.¹³ Selain itu, ada

¹² Watson Adam, diterbitkan oleh Methuen *The Dialogues Between States*, di London pada tahun 1984. Hlm.1

¹³ E. Jayanti (2014, 4 Maret).

[https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/03/Artikel persen 20Ejournal persen 20Genap-eRhiin persen 20 persen 2803-04-14-05- 46-53 persen 29.pdf](https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/03/Artikel%20persen%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20persen%20persen%202803-04-14-05-46-53%20persen%2029.pdf) tadinya diambil pada tanggal 18 April 2017. (20.08 WIB).

kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi, perdagangan dan komersial, perlindungan warga negara yang tinggal di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan pamor bersahabat dengan negara lain, dan sebagainya.

2.1.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah rumusan yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional. Sikap suatu negara dalam politik internasional tergantung pada bagaimana negara itu membentuk kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, jika suatu negara didasarkan pada kepentingan nasional untuk melakukan hubungan internasional, itu bersifat tentatif, yang merupakan fenomena hubungan internasional saat ini di mana suatu negara menyesuaikan kepentingan nasionalnya dari waktu ke waktu, itu akan tercermin dalam sistem. Kepentingan nasional penting bagi negara karena menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan komponen kebutuhan terpenting negara tersebut, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kemakmuran ekonomi. Semua negara tertarik untuk mencari kekuasaan dan pengaruh.¹⁴

Tidak dapat disangkal bahwa suatu negara menjadi lebih sukses ketika berkolaborasi dengan negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran negara dalam menyediakan bahan-bahan sebagai dasar kepentingan

¹⁴M.Nincic (1999). *Political Studies*, 61 , *Select National Interest and Its Interpretation*. p. 29-55.

nasional akan menjadi tontonan bagi masyarakat internasional sebagai negara yang memiliki hubungan terkait dengan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri suatu negara dikatakan dalam kepentingan nasional ketika itu adalah kepentingan terbaik negara secara keseluruhan yang bertentangan dengan kepentingan tertentu Artinya, masalah-masalah ini dapat muncul sebagai masalah kebijakan luar negeri jika kekuatan nasional masing-masing negara tidak dapat menyelesaikannya.

Kepentingan nasional ditentukan oleh semua aspek dari suatu negara. budaya, ekonomi, keamanan, identitas nasional, hubungan internasional, dan sebagainya. Kepentingan nasional merupakan faktor yang harus dipertimbangkan suatu negara ketika merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional ditentukan untuk kepentingan bangsa, untuk mencapai tujuan nasional. Kepentingan nasional mengacu pada upaya suatu negara untuk bertahan hidup. Dari perspektif hari ini, kita dapat melihat dengan tepat bagaimana kepentingan nasional menghasilkan dua hasil, yaitu saling ketergantungan dan konflik. Harmoni dan saling ketergantungan dapat dicapai jika kepentingan nasional suatu negara sejalan dengan kepentingan negara lain. Jika tidak, konflik akan muncul dan kepentingan nasional antar negara akan saling berbenturan.

Situasi ini mau tidak mau harus dihadapi oleh semua pihak dalam urusan internasional saat ini, karena hubungan antara mereka yang terlibat dalam urusan internasional semakin berkembang. Ide kepentingan nasional

sendiri pada dasarnya lahir dari tradisi kaum realis dalam hubungan internasional. Negara adalah satu-satunya aktor penting. Untuk bertahan hidup, negara harus melakukan segala kemungkinan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlepas dari anggapan tersebut, lahirlah konsep kepentingan nasional. Dimana negara dituntut untuk menjaga eksistensi negara dalam sistem internasional yang anarkis.¹⁵

Menurut Hans. J Morgenthau, menyatakan bahwa konsep kepentingan nasional (*national interest*) dan kekuasaan (*power*) sebagai hal yang utama dalam membangun kerangka politik luar negeri dan politik domestik suatu negara. Kedua hal ini kemudian didefinisikan oleh Morgenthau bahwa kepentingan nasional sebagai tujuan negara dalam melakukan kegiatan politik internasional, sedangkan kekuasaan (*power*) didefinisikan sebagai sarana bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Di sisi lain, menurut Clinton, ada dua cara untuk memahami kepentingan nasional. Kepentingan publik dapat dilihat sebagai memanifestasikan dirinya dalam kepentingan nasional, untuk memulai. Menurut sudut pandang ini, warga suatu bangsa membentuk komunitas dengan nilai-nilai yang sama. Setiap anggota masyarakat harus menghargai dan menjadi bagian darinya agar masyarakat dapat berfungsi. Dengan demikian, dalam hal ini diyakini bahwa kepentingan umum tercermin

¹⁵ Mr. Burchill (2005). Kepentingan Nasional dalam Teori Hubungan Internasional, 10.1057/9780230005778 hlm.63

¹⁶ H. Morgenthau (1952). The National Interest of the United States is another "Great Debate." 10.2307/1952108, American Political Science Review, 46(4), 961-988. hlm 3

dalam kepentingan nasional. Kedua, istilah "kepentingan nasional" mengacu pada konsep-konsep diplomatik yang saling melengkapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan unit-unit nasional lainnya. Tujuan negara untuk mempertahankan atau meningkatkan otoritasnya dapat dilihat sebagai kepentingan nasional.¹⁷

Ketika interdependensi dan kepentingan nasional dibahas, maka keduanya akan terjalin erat. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain karena seberapa besar kepentingan nasional suatu bangsa mempengaruhi interdependensinya. Di sisi lain, interdependensi akan berubah menjadi ketergantungan jika suatu bangsa salah mengartikan kepentingan nasionalnya sendiri. Dalam hal ini, pembentukan hubungan oleh negara yang dapat menguntungkan dan memenuhi kewajibannya didasarkan pada kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, hubungan dapat bersifat bilateral atau multilateral.

Di masa lalu, sebagian besar negara memiliki tingkat kemandirian satu sama lain.¹⁸ Di dunia yang saling terhubung saat ini, negara-negara bekerja sama dengan banyak negara secara bersamaan. Mengingat berbagai topik yang dicakup oleh studi hubungan internasional saat ini, isu-isu modern atau non-tradisional juga disertakan. Oleh karena itu, jika jumlah penduduk terus bertambah, suatu bangsa tidak dapat mengejar kepentingan

¹⁷ Yuliana Fartianur, Jurnal Hubungan Internasional, Kepentingan Thailand Melakukan Gastrodiplomasi Melalui Dapur Dunia. Pada tahun 2018, Vol. 6, hlm 1566,

¹⁸ Ibid

nasionalnya sendiri. Solusinya adalah agar negara-negara secara kolektif mengambil inisiatif untuk mendorong integrasi dalam kelompok berdasarkan kedekatan geografis atau frekuensi kejadian. Akibatnya, hubungan difokuskan pada pencapaian kepentingan bersama.

Akibatnya, ketika ketidakpuasan Arab Saudi terhadap Qatar memadat pada tahun 2017, paham Hali menyoroti bahwa kepentingan nasional yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar yang terlihat terkait integrasi kawasan Teluk terpaksa sirna. Dampak terburuk dari kerja sama untuk kesejahteraan masyarakat sipil dalam sejarah hubungan kedua negara adalah terputusnya hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi pada tahun 2017 yang merupakan indikasi adanya pelanggaran antara negara-negara Teluk.

Dan Krisis diplomatik antara kedua negara ini, bahkan telah menyebar ke kawasan Teluk, terbukti dengan fakta bahwa Bahrain dan Uni Emirat Arab, dua negara Teluk, dan Mesir, dan satu negara Arab, mencontoh Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pada saat yang sama, 5 Juni 2017. Hal ini mengejutkan banyak pihak, terutama Qatar sendiri yang terkena dampak langsung dari keputusan keras yang diambil oleh negara Arab Saudi dan rekan-rekannya hingga sekarang ini menjadi berhubugan diplomasi dengan baik.

Jika kita melihat dari sisi sejarah hubungan Arab Saudi dengan Qatar, maka tidak heran jika fenomena pada silam tahun 2017 mengenai pemutusan terjadi hubungan Qatar dan Arab Saudi menjadi tertegang

dalam diplomatik. Setelah invasi pimpinan Saudi ke Bahrain pada tahun 1971, hubungan antara Qatar dan Arab Saudi paling tegang. Bahkan Arab Saudi dan Qatar kompak untuk berpartisipasi dalam kerja sama regional yang dipatenkan sebagai GCC dan disebut Dewan Kerjasama Teluk dalam bahasa Indonesia.

Hal lain yang turut berperan dalam keharmonisan antara Negara Qatar dan Arab Saudi merupakan fakta bahwa Arab Saudi adalah pelindung pemerintah Qatar atau rezim de facto Sheikh Hamad. Inilah salah satu alasan mengapa dua dekade kemudian Arab Saudi menyesali penggulingan pemerintahan Syekh Hamad. Dan sebenarnya, alasan utama awal permusuhan antara Riad dan Doha adalah Sheikh Hamad bin Khalifa, yang Riadnya digulingkan oleh Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al Zani pada tahun 1995. Itu terjadi ketika tidak menyukai pemerintahan Al Zani.¹⁹



¹⁹ Nashih Nashrullah, jatuh-bangun-timur-tengah-di-tangan-barat pada 13 Sep2015, <https://republika.co.id/berita/koran/islam-digestkoran/15/09/13/>